



KPU DIY Tunda Pengesahan Rekapitulasi Suara

● SILVY DIAN SETIAWAN

Penghitungan suara yang telah disahkan yakni Kulonprogo dan Gunungkidul.

BANTUL — Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY menunda pengesahan rekapitulasi suara untuk Kota Yogyakarta. Hal ini dilakukan setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY menemukan empat selisih data pengguna hak pilih DPR RI dan DPD RI untuk Kota Yogyakarta.

Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan mengatakan, pihaknya akan melakukan penelusuran kembali terkait hal ini. Dengan begitu, pengesahan rekapitulasi suara Pemilu 2019 untuk Kota Yogyakarta untuk sementara ditunda.

"Kita cek dulu sampai ke bawah seperti apa kejadiannya. Kan baru kita lihat di angka rekapnya. Tapi faktual seperti apa, nanti ditelusuri," kata Hamdan di Jogja Expo Center (JEC), Selasa (7/5).

Untuk rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara

sendiri akan dilakukan hingga 8 Mei ini. Penghitungan suara yang telah disahkan yakni Kulonprogo dan Gunungkidul pada Senin (6/5).

Dikatakan, tenggat pengesahan rekapitulasi DIY dilakukan hingga 12 Mei. Setelah itu, rekapitulasinya akan dikirim ke KPU RI. "Itu menjadi dasar bagi KPU RI untuk melakukan rekap nasional khususnya untuk presiden, DPD, dan DPR RI. Karena kewenangan di Jakarta semuanya," ujar Hamdan.

KPU DIY pun terus melakukan verifikasi terhadap data petugas Pemilu 2019 yang tertimpa musibah saat bertugas. Hasil verifikasi akan dikirimkan ke KPU RI. "Kita terus verifikasi datanya terus kita kirim ke Jakarta (KPU RI). Data itu kan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pelengkap yang harus dipenuhi," kata Hamdan.

Verifikasi data dilakukan tidak hanya kepada petugas yang bertugas saat pemungutan suara. Namun, verifikasi data dilakukan sejak petugas pemilu mulai bertugas pada Januari 2019. "Jadi PPK yang meninggal itu sejak dia mulai bertugas di Januari dan Februari dia meninggalnya. Tidak cuma waktu pemungutan, dan kita data semuanya".

Ia mengatakan, hingga saat ini sudah tercatat 11 petugas yang meninggal dan 48 jatuh sakit. Petugas terdiri dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Linmas dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). "Kalau yang meninggal 11 petugas itu ada sembilan orang KPPS, satu Linmas, dan satu PPK," kata Hamdan.

Terhadap petugas pemilu yang tertimpa musibah akan diberikan santunan oleh KPU RI. Nantinya, santunan dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Santunan dari pusat, dari Jakarta semua. Mekanismenya nanti pasti dari APBN, KPU RI dan diteruskan ke KPU Provinsi dan kabupaten," katanya.

Sebelumnya, Bawaslu DIY menemukan empat perbedaan selisih data pengguna hak pilih antara DPD RI dan DPR RI untuk Kota Yogyakarta. Hal ini ditemukan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019, Selasa.

Tercatat, jumlah pengguna hak pilih DPR RI untuk Kota Yogyakarta sebesar 267.508 pemilih. Namun, pengguna hak pilih DPD RI untuk Kota Yogyakarta sebesar 267.512 pemilih.

Dari jumlah tersebut dapat dilihat adanya selisih data pengguna hak pilih antara DPD RI dan DPR RI. Seharusnya, jumlah pengguna hak pilih DPD RI dan DPR RI sama karena memiliki dapil yang sama.

"DPD sama DPR RI Dapilnya sama, ketika satu orang dapat surat suara DPR maka dia dapat DPD. Apakah sah atau tidak sah soal lain, masalahnya ada selisih empat suara yang kita bertanya dan ingin tahu lebih jauh," kata Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono.

Untuk itu, Bawaslu DIY masih menunggu penjelasan dari KPU terkait hal ini. Tentunya KPU diminta untuk melakukan penelusuran lebih jauh. "Nanti kita lihat hasil pengecekan dari KPU seperti apa. Apakah bisa menemukan adanya kesalahan input atau seperti apa," ujarnya.

Selain itu, Bawaslu DIY juga menemukan adanya kesalahan administrasi. Yang mana, ada data tertukar antara pengisian data pengguna hak pilih dengan data pemilih tetap. "Rekomendasi kita soal data pemilih harusnya diisi data yang di SK, tapi ditulis data yang riil, padahal saya pengguna itu data yang real. Makanya kita minta *reinform*," kata Bagus. ■ **ed: fernan rahadi**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005